



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
PANJA BOPTN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, KEMENRISTEKDIKTI RI , BADAN EKONOMI KREATIF DAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2015-2016.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dengan	: 1. Rektor Univ. Indonesia (UI); 2. Rektor Univ. Diponegoro (UNDIP); 3. Rektor Univ. Brawijaya (UNBRAW); 4. Rektor Univ. Sebelas Maret (UNS); 5. Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB); 6. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB); 7. Wakil Rektor Univ. Gajah Mada (UGM); 8. Wakil Rektor Univ. Airlangga (UNAIR); dan 9. Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI.
Hari/Tanggal	: Selasa, 08 September 2015.
Pukul	: 10.40 – 13.35 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Ir. H. Nuroji/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Panja BOPTN Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Masukan mengenai Implementasi Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; 2. Lain-lain.
Hadir	: 16 dari 27 Anggota Panja BOPTN Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BOPTN Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Panja BOPTN/Ir. H. Nuroji, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

- A. Panja BOPTN Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Rektor Universitas Indonesia (UI), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), Rektor Universitas Diponegoro (UNDIP), Rektor Universitas Brawijaya (UNIBRAW), Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Wakil Rektor Universitas Gajahmada (UGM), Wakil Rektor Universitas Airlangga (UNAIR), dan Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI atas bahan paparan, presentasi, penjelasan implementasi dan permasalahan BOPTN, serta usulan perbaikan program BOPTN untuk periode mendatang.
- B. Beberapa permasalahan menonjol terhadap implementasi BOPTN diantaranya adalah sbb:
1. Sebelum menerima BOPTN, PTNBH harus melakukan kontrak kinerja dengan Kemenristekdikti RI yang harus memenuhi 4 (empat) kriteria (akreditasi, mutu, tata kelola, dan prestasi).
 2. Alokasi BOPTN cenderung mengutamakan perbandingan antara pendapatan kerjasama dengan penerimaan mahasiswa, sehingga universitas yang besar mendapatkan alokasi yang lebih besar, hal ini kurang sesuai dengan prinsip keadilan.
 3. Alokasi BOPTN untuk kebutuhan operasional seharusnya dimungkinkan bagi unit kerja baru, seperti Rumah Sakit Pendidikan agar dapat beroperasi.
 4. Penerapan UKT akan sangat sulit terlaksana tanpa adanya BOPTN, namun alokasi BOPTN yang ada saat ini baru mencukupi UKT sekitar 20% dari BKT.
 5. Pencairan dana BOPTN sering mengalami keterlambatan.
 6. Dana untuk penelitian dan pengabdian masyarakat masih sangat kurang.
- C. Beberapa usulan untuk perbaikan formula BOPTN diantaranya adalah:
1. Alokasi BOPTN tetap diadakan dan harus memenuhi prinsip keadilan terutama untuk mencukupi kekurangan UKT sehingga terpenuhi standar pendidikan tinggi.
 2. Perlu diberikan alokasi BOPTN program khusus untuk kebutuhan khusus atau keunggulan khusus seperti halnya untuk dukungan pada Rumah Sakit Pendidikan.
 3. Kepastian alokasi dan waktu pencairan untuk BOPTN dan Bidikmisi perlu dipertegas sejak awal anggaran.
 4. Dalam rangka mendorong industri untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi di bidang penelitian, maka sistem perpajakan (*tax deductible*) perlu dipertimbangkan, termasuk pula insentif bagi perguruan tinggi yang telah menghasilkan penelitian terapan.

D. Panja BOPTN dan Majelis Rektor PTN Indonesia.

1. Panja BOPTN Komisi X DPR RI akan mengkaji lebih lanjut terhadap berbagai permasalahan dan usulan yang disampaikan tersebut di atas, yang selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan dan rekomendasi Panja.
2. Majelis Rektor PTN Indonesia akan menyampaikan usulan rumusan perhitungan alokasi BOPTN, penggunaan dana, dana penelitian, pencairan dana, dan mekanisme, serta ruang lingkup BOPTN paling lambat akhir September 2015.

III. Lain-lain.

LPDP.

Perlu dipertimbangkan beasiswa yang dibiayai melalui LPDP untuk mahasiswa dan dosen yang akan belajar dan tugas belajar di PTN.

IV. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul **13.35 WIB.**

KETUA,



IR. H. NUROJI